

LKjIP 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini. Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas kinerja, laporan ini juga memuat tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. LKjIP Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna namun kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja instansi pemerintah.

Kami berharap melalui LKjIP Tahun 2024 ini, dapat menjadi bahan optimalisasi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana guna mendukung terciptanya *Good Governance & Clean Government* untuk meningkatkan kinerja dengan konsep perbaikan kinerja secara berkelanjutan (*continuously improvements*) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karanganyar



NUR AINIFARIDA., S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197709151996022001

Ikhtisar Eksekutif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah berperan dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sekaligus merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang kepegawaian. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama masing masing adalah Nilai Sistem Merit melebihi target sedangkan Nilai SAKIP BKPSDM dibawah target.

Sementara untuk realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.764.313.179,- atau sebesar 91,82% dari pagu anggaran Rp.9.545.343.980,- yang digunakan untuk mengimplementasikan 3 program dan 42 sub kegiatan. Dari 42 sub kegiatan tersebut 22 sub kegiatan diantaranya merupakan kegiatan rutin kesekretariatan dan 20 kegiatan wajib urusan kepegawaian. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan pada Tahun 2025 sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan.

Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	1
C. Isu Strategis.....	8
D. Dasar Hukum	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Program Unggulan.....	13
C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja.....	14
D. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	16
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	16
F. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	17
G. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	12
Tabel 2.2	Skema Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja	15

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 16

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 18

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 18

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja..... 19

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 20

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya 20

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Level Nasional .. 21

Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 21

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 22

Tabel 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23

Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 24

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator 24

Tabel 3.12 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Capaian Kinerja 25

Tabel 3.13 Penyerapan/Realisasi per Sub Kegiatan 30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan kepegawaian. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

B. Gambaran Umum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Perda Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

2. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB.
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

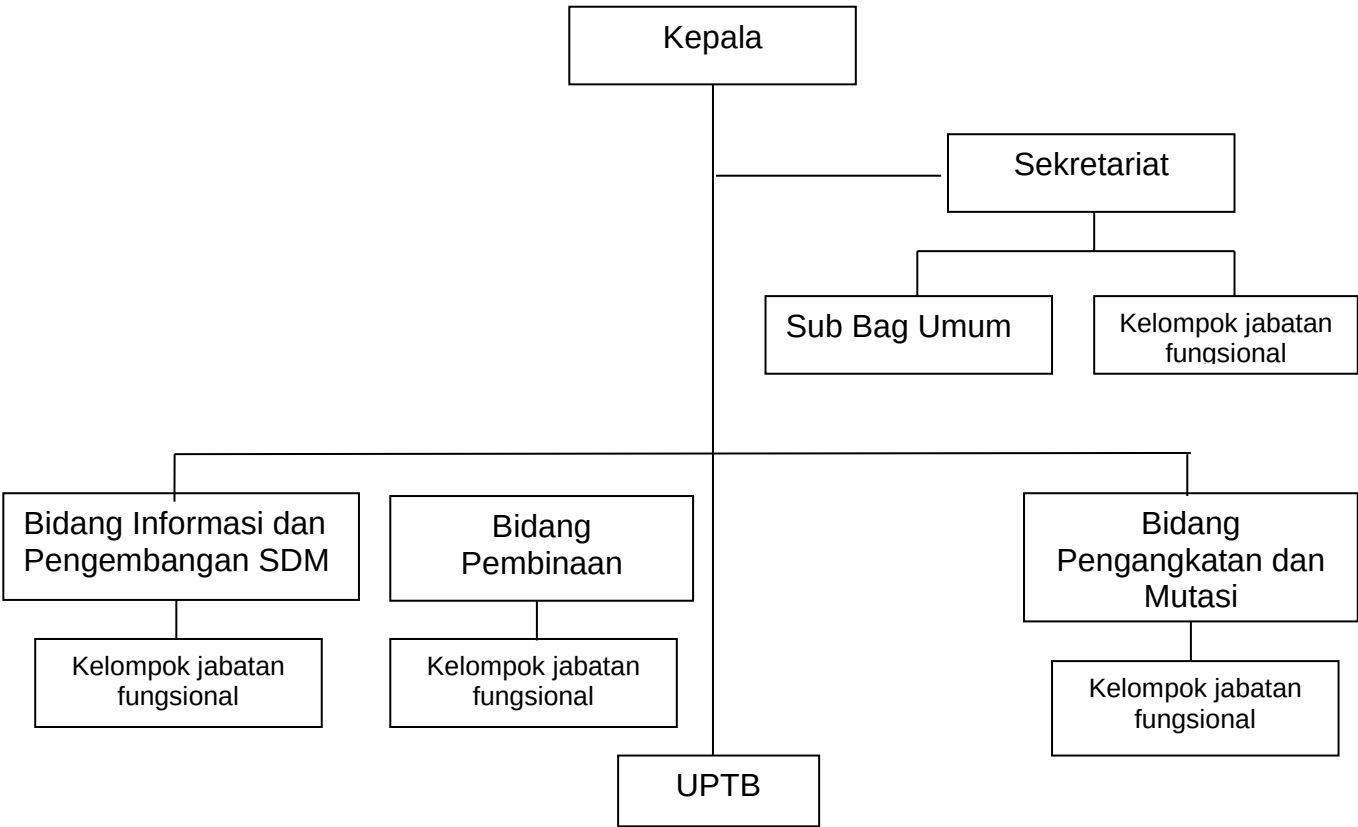
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat;

- Sub Bagian Umum
3. Bidang Pengangkatan dan Mutasi
4. Bidang Informasi dan Pengembangan SDM
5. Bidang Pembinaan

STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM
KABUPATEN KARANGANYAR SESUAI PERDA KAB.KARANGANYAR



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab.Karanganyar

Susunan Pejabat Struktural Badan Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

: Nur Aini Farida, S.STP., M.M.
2. Sekretaris

: Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.

a. Kepala Sub Bagian Umum

: Irine Magdalena Elsyne, S.E., M.M.
- BKPSDM | KABUPATEN KARANGANYAR

3

3. Kepala Bidang Pengangkatan
& Mutasi : Djoko Sumarsono, S.E.
4. Kepala Bidang Informasi dan
Pengembangan SDM : Isniari Dewi M, S.STP.
5. Kepala Bidang Pembinaan : Dwi Wahyuningsih, S.H, M.M.

3. Sumber Daya

3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar didukung oleh 43 orang pegawai yang keseluruhannya telah diangkat menjadi PNS dan PPPK.

DAFTAR PEGAWAI

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAW AIAN (PNS/CPN S)	PANGKA T/ GOL.
1	Nur Aini Farida, S.STP., M.M.	NIP. 19770915 199602 2 001	PNS	IV/c
2	Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.	NIP. 19670114 199503 1 003	PNS	IV/b
3	Dwi Wahyuningsih, S.H, M.M	NIP. 19690711 199603 2 002	PNS	IV/a
4	Isniari Dewi M, S.STP	NIP. 19770124 199703 2 004	PNS	IV/a
5	Djoko Sumarsono, S.E.	NIP. 19710803 199203 1 004	PNS	IV/a
6	Drita Evana S., S.Psi, M.M	NIP. 19781029 200312 2 005	PNS	IV/a
7	Endar Pangestuti, S.E	NIP. 19720605 199603 2 001	PNS	III/d
8	Irine Magdalena Elsy, S.E., M.M	NIP. 19810920 200902 2 003	PNS	III/d
9	Dessy Marsistawati, S.E	NIP. 19721215 199803 2 005	PNS	III/d
10	Aris Kurniawan, SH, M.Si	NIP. 19810920 200902 2 003	PNS	IV/a
11	Naniek Haryani, S.E	NIP. 19661224 198603 2 007	PNS	III/d
12	Joko Pramono, S.E.	NIP. 19701123 201001 1 005	PNS	III/d
13	Lulus Nugroho, S.Psi	NIP. 19790411 201001 1017	PNS	III/d
14	Tweyrianti Nuzulita S, S.Psi,M.M	NIP. 19780121 201001 2 015	PNS	III/d
15	V Nining Aryanti, S.Sos, M.M	NIP. 19761107 201001 2 010	PNS	III/c
16	Yusuf Mustofa,S.Si	NIP. 19781120 201001 1 011	PNS	III/d
17	Anggara Nur Patria, S.Psi	NIP. 19850528 201101 1 004	PNS	III/c

18	Wahyu Yetti Isrudatini, S.AB, M.M	NIP. 19830131 201001 2 020	PNS	III/b
19	SR. Widyastuti	NIP. 19700101 199303 2 015	PNS	III/b
20	Rizky Oktaria, S.Psi., M.M.	NIP. 19901027 201403 2 002	PNS	III/b
21	Sugiyarto, S.E.	NIP. 19800322 200604 1 011	PNS	III/c
22	Faridatul Umniyah,S.STP	NIP. 19940405 201609 2 003	PNS	III/c
23	Joko Suwarno, A.Md.	NIP. 19830211 201001 1 011	PNS	III/b
24	Luqi Hermaya, S.STP.	NIP. 19950921 201708 2 002	PNS	III/b
25	Adrian Unggul Wirawan, S.Kom	NIP. 19820620 201101 1 013	PNS	III/a
26	Rini Setyawati, S.Kom	NIP. 19920331 201903 2 010	PNS	III/b
27	Efra Radisya Clariti, S.STP	NIP. 19980331 202008 2 001	PNS	III/b
28	Alvia Callista Makarim, S.Tr.IP	NIP. 19971182 202108 2 001	PNS	III/a
29	Pratiwi Ramadhani, S.Tr.IP	NIP. 19990116 202108 2 002	PNS	III/a
30	Yuni Setyowati, S.M.	NIP. 19780611 200902 2 006	PNS	II/d
31	Atik Sulistyowati	NIP. 19790525 200801 2 019	PNS	III/a
32	Mukhlis Shotus Salamah, A.Md.Ak	NIP. 19980430 202203 2 012	PNS	II/c
33	Diah Ayu Kusuma W, S.Kom.	NIP. 19930724 201502 2 001	PNS	III/b
34	Karianggara	NIP. 19761015 200902 1 005	PNS	II/c
35	Marita Anggraini, S.Tr. IP.	NIP. 20000828 202208 2 003	PNS	III/a
36	Suparno	NIP. 19811203 201001 1 003	PNS	I/d
37	Ratna Sih Indriani, S.A.P.	NIP. 19810619 202421 2 007	PPPK	Gol. IX
38	Atik Rohaniyawati, S.E.	NIP. 19810619 2024221 2 009	PPPK	Gol. IX
39	Monica Uning Prawesti, S.Psi.	NIP. 19840813 2024221 2 009	PPPK	Gol. IX
40	Difa Inggrayuwana, S.M.	NIP. 20000605 202424 2 007	PPPK	Gol. IX
41	Isnaini Nur Rohmah, S.M.	NIP. 19981211202424 2 016	PPPK	Gol. IX
42	Laily Dyah Widyawati, A.Md.	NIP. 19970317 202424 2 027	PPPK	Gol. VII
43	Wisnu Maulana P., A.Md.Kom	NIP. 19970716 202421 1 011	PPPK	Gol. VII

a. Daftar Pejabat Struktural OPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLAT PIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Nur Aini Farida, S.STP., M.M.	Kepala BKPSDM	SUDAH	SUDAH
2	Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.	Sekretaris BKPSDM	SUDAH	SUDAH

3	Isnari Dewi M, S.STP	Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan SDM	SUDAH	SUDAH
4	Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.	Kabid. Pembinaan	SUDAH	SUDAH
5	Djoko Sumarsono, S.E.	Kabid. Pengangkatan dan Mutasi	SUDAH	SUDAH
6	Irine Magdalena Elsy, S.E., M.M	Kasubbag. Umum	SUDAH	SUDAH

b. Daftar Pejabat Struktural Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1	-	-

c. Daftar Pejabat Fungsional (umum/khusus)

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Drita Evana S, S.Psi, Psi, M.M	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda
2	Ratna Sih Indriani, S.A.P.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama
3	Difa Inggrayuwana, S.M.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama
4	Endar Pangestuti, S.E	Perencana Ahli Muda
5	Dessy Marsistawati, S.E	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
6	Aris Kurniawan, S.H, M.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
7	Lulus Nugroho, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
8	Tweyrianti Nuzulita S, S.Psi, M.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
9	V Nining Aryanti, S.Sos, M.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
10	Wahyu Yetti Isrudatini, S.AB,MM	Analisis SDMA Ahli Pertama
11	Adrian Unggul Wirawan, A.Md	Pranata Komputer Mahir
12	Anggara Nur Patria, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
13	Rizky Oktaria, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
14	Laily Dyah Widyawati	Arsiparis Terampil
15	Isnaini Nur Rohmah, S.M.	Analisis SDMA Ahli Pertama
16	Monica Inung Prawesti, S.Psi.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama

17	Atik Rohaniyawati, S.E	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama
18	Wisnu Maulana Primadhita, A.Md.Kom	Pranata Komputer Terampil

- a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :
- Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimulai dari SLTP sampai S-2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	10	2	8
2	S1	25	7	18
3	DIII	4	2	2
4	SLTA	4	2	2
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		43	13	30

- b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 2.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	1	1	-
2	II	3	1	2
3	III	25	7	18
4	IV	7	3	4
5	Gol. VII	2	1	1
6	Gol. IX	5	0	5

Jumlah	43	13	30
--------	----	----	----

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 permasalahan ASN terkait penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dengan tanpa diskriminasi, maka ditetapkan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah belum tercapainya dan terimplementasinya Sistem Merit.

D. DASAR HUKUM

Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

1. Tujuan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan tujuan : “Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas”

2. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar menjabarkan dalam sasaran-

sasaran strategis yang ditetapkan secara tahunan dalam periode 2024 - 2026. Sasaran Strategis dan target kinerja selama 3 tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian				
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	63,66	64	65	67	70	70
		1.	Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit.	Nilai Sistem Merit	185	250	255	280	300	300
		2.	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	72	74	76	78	80	80

B. Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didasarkan pada dua sisi, yaitu *internal* dan *eksternal*.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur PNS di Kabupaten Karanganyar yang lebih berkompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan kariernya.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan bahan logistik kantor
12. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
16. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
17. Penyediaan jasa surat menyurat
18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Program Kepegawaian

1. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
2. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
4. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah
5. Pengelolaan data pegawai
6. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
7. Pengelolaan mutasi ASN
8. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
9. Pengelolaan promosi ASN
10. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
11. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
12. Pengelolaan assesment Center
13. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
14. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
15. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
16. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
17. Pembinaan disiplin ASN
18. Pelayanan proses ijin perceraian pegawai

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintah umum
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan

C. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 BKPSDM tersebut perlu menjabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2

SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit.	Nilai Sistem Merit	255
2			Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	76

D. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2024

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22
2	Program Kepegawaian	18
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2

E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan dokumen Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

G. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pengimplementasian sistem merit menjadi salah satu perhatian BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Beberapa inovasi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya nilai sistem merit yang baik antara lain adalah :

a. SATU DATA

Satu data adalah sebuah aplikasi kepegawaian berbasis web yang ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data-data dan proses kepegawaian. Dengan adanya Satu Data ini, diharapkan data-data kepegawaian dapat tersaji dengan lebih transparan dan pegawai dapat lebih mudah mengakses data-data pribadi serta data-data kepegawaian yang tersimpan di sistem.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dianalisis dalam LKjIP Tahun 2024 ini mengikuti Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026. Pencapaian Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2024 diukur dengan menggunakan skala kinerja sebagaimana terlihat dalam table 3.1

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	diatas 100%	Melebihi Target
2.	tepat 100%	Sesuai Target
3.	dibawah 100%	Dibawah Target

1. Membandingkan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2024

Ada 2 Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, target dan realisasi pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sitem merit	Nilai sistem merit*	255	257	100,7%	Melebihi Target

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2.	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM*	76	71,70	94,34%	Dibawah Target
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2024			97,52%			

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1) Nilai Sistem Merit

Indikator Kinerja Utama BKPSDM yang pertama yaitu Nilai Sistem Merit. Penilaian ini hasil dari pemenuhan bukti dukung dari parameter penilaian sistem merit. Parameter tersebut terdiri dari :

- a. Perencanaan Kebutuhan
- b. Pengadaan
- c. Pengembangan Karier
- d. Promosi dan Mutasi
- e. Manajemen Kinerja
- f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- g. Perlindungan Pelayanan
- h. Sistem Informasi

Hasil penilaian sistem merit Tahun 2024 menggunakan penilaian Tahun 2023 dikarenakan terdapat migrasi pelimpahan dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Badan Kepegawaian Negara. Penilaian sistem merit Tahun 2024 hanya dilakukan untuk 3 nilai terbaik agar Tahun 2025 nilainya sangat baik dan 1 kabupaten yg nilainya buruk agar Tahun 2025 nilainya menjadi baik.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Kategori
-----	-------------------	-------------	----------------	----------

1.	Nilai Sistem Merit	255	257	Melebihi Target
----	--------------------	-----	-----	-----------------

Capaian nilai sistem merit ini akan ditingkatkan terus hingga mendapatkan predikat sangat baik dengan nilai 325 – 400.

2) Nilai SAKIP BKPSDM

Indikator Kinerja Utama BKPSDM yang kedua yaitu Nilai SAKIP BKPSDM. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Hasil penilaian sistem merit tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Kategori
1.	Nilai SAKIP BKPSDM*	76	71,70	Dibawah Target

Penilaian yang ditampilkan adalah penilaian pada Tahun 2023 dikarenakan proses pengukuran kinerja belum selesai.

2. Membandingkan Antara Tahun Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2022-2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja			Realisasi Kinerja Renstra		
		2022	2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Sasaran: Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit						
1.	Nilai Sistem Merit	183,5	196,5	255	257	Diatas 100%

Sasaran: Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
2.	Nilai SAKIP BKPSDM	69,55	71,70	76	71,70	Dibawah 100%

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Capaian Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja level nasional diuraikan pada level berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Level Nasional

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun ini	Capaian Level Nasional	
			Tertinggi	Terendah
Sasaran: Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit				
1.	Nilai Sistem Merit	257	324	251,5
Sasaran: Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
2.	Nilai SAKIP BKPSDM	71,70	74,30	67,15

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 - 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan

1	2	3	4	5 = 3/4*100
1	Nilai Sistem Merit	257	300	85,6
2	Nilai SAKIP BKPSDM	71,70	80	89,6

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Capaian Keberhasil/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Sistem Merit	255	257	100,7%	Pada tahun 2024 BKPSDM mampu memenuhi target yang ditetapkan karena BKPSDM mampu memenuhi bukti dukung yang harus dipenuhi untuk mendukung penilaian sistem merit.	Diharapkan tahun 2025 nilai sistem merit meningkat sesuai dengan target, salah satu yang diharapkan untuk bisa meningkatkan nilai sistem merit yaitu pemenuhan bukti dukung peraturan bupati tentang assesment.

2	Nilai SAKIP BKPSDM	76	71,70	94,34%	Nilai SAKIP belum mencapai target. Terdapat beberapa penilaian yang nilainya belum maksimal yaitu pelaporan kinerja. Dokumen pelaporan kinerja belum bisa menunjukkan perbandingan dengan perbandingan nilai nasional.	Memperbaiki pelaporan kinerja agar dapat menaikkan nilai SAKIP.
---	--------------------	----	-------	--------	--	---

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pada sasaran strategis 1 yaitu meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit untuk efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.9

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			%
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	realisasi	
1	Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit	Nilai Sistem Merit	255	257	100,7	Program Kepegawaian	Rp2.230.637.000	1.936.731.545	86,82
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp969.760.300	917.334.568	94,59
Target efisiensi : 2,8%									

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis 1 yaitu 100,7% dengan penyerapan anggaran dari masing masing program yang mendukung sasaran strategis 1 yaitu 86,82% dan 94,59% dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebanyak 2,7%.

Sedangkan pada sasaran strategis 2 yaitu meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia untuk efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.10

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			%
			Target	Realisasi	%	Program	Pagu	realisasi	
1	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP	76	71,70	94,34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6.344.946.680	Rp5.910.247.066	93,15
Target efisiensi : 0,7 %									

Tabel 3.11

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kuantitas ASN berbasis sistem merit	Nilai Sistem Merit	257	90,7	2,8
2	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	70,17	98,67	0,7

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai target indikator sasaran yaitu nilai sistem merit dan nilai SAKIP BKPSDM didukung oleh beberapa program yang didalamnya terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya target dari indikator sasaran. Berikut ditunjukkan pada tabel dibawah capaian dari

masing masing kegiatan yang mendukung indikator sasaran :

Tabel 3.11

Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
Nilai Sistem Merit	Program Kepegawaian				
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3	3	100
	Evaluasi Pengadaan PNS dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	3	3	100
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12	12	100
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2	2	100
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2	2	100
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	2	2	100

	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi, JPT, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4	4	100
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6	6	100
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4	4	100
	Pengelolaan Assesment Center	jumlah dokumen pengelolaan assesment center	4	4	100
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	500	504	109
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	600	561	93,5
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1	1	100
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2	2	100
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	2500	3584	143,4

	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	200	243	121,5
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800	8800	100
	Pelayanan Proses Izin Perceraian	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	10	10	100
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintah umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2600	3747	144,1
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	13	7	53,8

Nilai SAKIP BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	100

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	5	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17	17	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	30	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah sebesar Rp. 9.545.343.980,- (*Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), dengan capaian realisasi sebesar Rp. 8.764.313.179,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tigabelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) atau 91,82% untuk melaksanakan 3 program dengan 42 sub kegiatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 ini kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar masuk dalam kategori baik.

Penyerapan Anggaran dari 3 Program pada Tahun 2024 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Terdapat penghematan sejumlah Rp. 434.699.614,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.344.946.680,- digunakan sebesar Rp. 5.910.247.066,-
- b. Program Kepegawaian Daerah
- Terdapat penghematan sejumlah Rp. 293.905.455,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.230.637.000,- direalisasi sebesar Rp. 1.936.731.545,-
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Terdapat penghematan sebesar Rp. 52.425.732,- dari total anggaran sebesar Rp. 969.760.300,-direalisasi Rp. 917.334.568,-

Tabel 3.9

Penyerapan / Realisasi per sub kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.344.946.680,-	5.910.247.066,-	93,15
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.825.000,-	4.824.800,-	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,-	4.997.800,-	99,96

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5.004.700,-	5.004.700,-	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100
6	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,-	15.000.000,-	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.200.000,-	199.625.000	95,42
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1077.630.680	4.731.577.561,-	92,64
9	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,-	14.999.800,-	99,9
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000,-	5.999.000	100
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.801.150,-	43.801.150,-	100
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	19.999.800,-	19.999.700	100
13	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.380.000,-	1.380.000,-	100
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.323.947,-	277.129.904,-	93,84
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.796.950,-	40.793.500,-	99,9
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.000.000,-	103.800.000,-	99,81

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.582.000,-	8.582.000,-	100
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,-	107.329.151,-	85,85
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.122.500,-	120.122.500,-	100
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.082.400,-	142.385.500,-	91,81
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.200.000,-	38.095.000,-	99,73
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.998.553,-	14.800.000,-	98,68
II	Program Kepegawaian Daerah	2.230.637.000,-	1.936.731.545,-	86,82
1	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1.018.772.000,-	808.481.500,-	85,25
2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	15.000.000,-	14.663.550,-	97,76
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	88.000.000,-	79.887.500,-	90,78
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	80.000.000,-	79.887.900,-	99,86
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	10.000.000,-	9.774.900,-	97,75
6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,-	49.497.948,-	99,4

7	Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000,-	22.143.850,-	73,81
8	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	40.000.000,-	36.266.750,-	90,67
9	Pengelolaan Promosi ASN	66.865.000,-	41.569.560,-	62,17
10	Pengelolaan Assesment Center	260.000.000,-	233.694.550,-	89,88
11	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	181.000.000,-	143.990.500,-	79,55
12	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30.000.000,-	19.830.487,-	66,1
13	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000,-	59.220.000,-	98,7
14	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71.500.000,-	68.950.000,-	96,43
15	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	104.000.000,-	98.125.800,-	94,35
16	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	10.000.000,-	8.589.700,-	85,9
17	Pembinaan Disiplin ASN	55.000.000,-	50.466.550,-	91,76
18	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	60.500.000,-	51.490.500,-	85,11
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	969.760.300,-	917.334.568,-	94,59
1	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan adiministrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintah umum	717.760.300,-	704.104.468,-	98,1

2	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	252.000.000,-	213.230.100,-	84,02
---	--	---------------	---------------	-------

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang telah selesai disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Pencapaian kinerja tersebut telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.

Dari hasil evaluasi dan analisa kinerja yang telah tersaji pada Bab III dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nilai Sistem Merit melebihi target sedangkan Nilaian SAKIP BKPSDM dibawah target. Sementara untuk realisasi kinerja keuangan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar 91,82%, dari total anggaran belanja sebesar Rp. 9.545.343.980,- (*Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), dengan capaian realisasi sebesar Rp. 8.764.313.179,- (*Delapan Milyar Tujuh Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) untuk melaksanakan 3 program dengan 42 sub kegiatan.

Capaian penyerapan sebesar Rp. 8.764.313.179,- atau 91,82% dari total anggaran sebesar Rp. 9.545.343.980,- pencapaian yang sudah baik telah dicapai oleh BKPSDM karena pelaksanaan kegiatan baik yang berkaitan dengan fasilitasi dan pengadaan PPPK, pelatihan dan pendidikan ASN telah dilakukan dengan baik sehingga anggaran dapat terealisasi.

Pada akhirnya sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar akan mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi anggaran ini pada masa mendatang. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja yang tentunya membutuhkan dukungan dan kemauan dari semua pihak, langkah-langkah tersebut diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja

Melaksanakan perbaikan secara terus menerus dalam perencanaan kinerja berupa peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui sinkronisasi antara penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yaitu RENSTRA, RENJA dan RKT.

2. Implementasi/pelaksanaan Kinerja

Diharapkan seluruh bidang dan sekretariat sebagai elemen pelaksana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih serius dan konsisten dalam melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga menghasilkan capaian kinerja yang maksimal.

3. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja yang difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data-data pelaksanaan kinerja. Pada tahap ini diharapkan setiap bidang teknis dapat segera menyerahkan data-data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja agar tahapan pelaporan kinerja tidak terhambat.

4. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan bulanan / Laporan Operasional Kegiatan bulanan secara tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun LKjIP tahunan karena adanya keterlambatan pelaporan kinerja maka akan menyebabkan rendahnya penilaian terhadap kinerja seluruh instansi yang bersangkutan.

5. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja ini diharapkan agar elemen pemeriksa selalu obyektif dengan harapan agar setiap kesalahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Nilai Sistem Merit

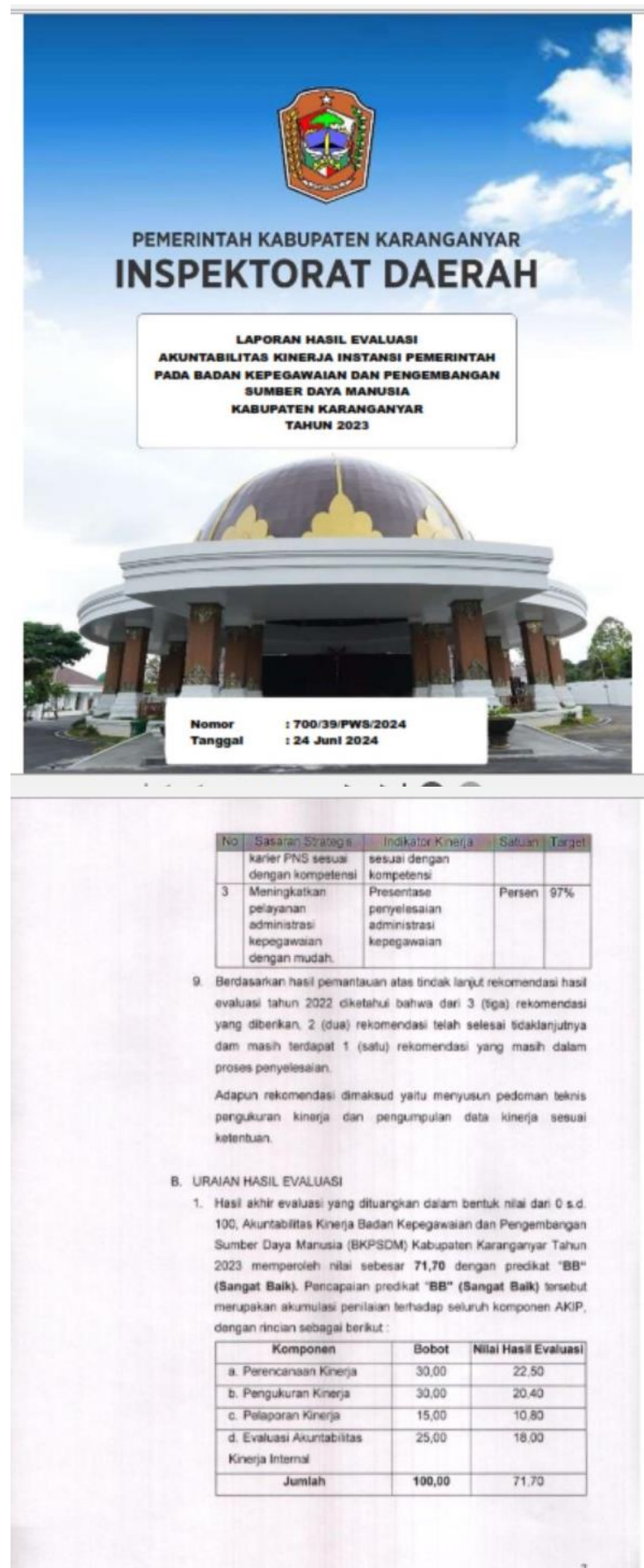
Nilai Sistem Merit: Kabupaten Karanganyar											
Nama Instansi:		Kabupaten Karanganyar									
Periode		01 Jan 2024 - 31 Dec 2024									
Tanggal Download		13-01-2025 14:00:57									
Nomor Dokumen		0006/SM1/VERIF/01/2024									
No	Aspek	Indikator	Kondisi Saat Ini	Bobot Indikator	Skor	Nilai Tim Verifikasi	Catatan Sub-Aspek	Nilai Akhir			
1	Perencanaan Kebutuhan	1	Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	2.5	4	4	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah, berdasarkan anjab dan ABK, diinisiasi menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi serta telah ditetapkan dengan keputusan PPK (Perhup 32/2022). Terlampir SK Peta Jabatan 2022 dan serta sampel SK Anjab dan ABK, namun proyeksi kebutuhan ASN 5 tahunan baru tersedia untuk 2025.	10			
		2	Ketersediaan data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian	2.5	4	3	Sudah tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi yang menampilkan data riwayat SKP dan hukdis. Namun, SIMPEG belum dapat diakses oleh setiap pegawai dan belum menunjukkan adanya integrasi dengan SIASIS.	7.5			
		3	Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	2.5	4	4	Sudah tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian	10			
		4	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK sesuai dengan program prioritas pembangunan dan/atau prioritas daerah INTAHFARI (Industri, Pertanian, Pariwisata)	2.5	4	3	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK. Akan tetapi, proyeksi kebutuhan ASN 5 tahunan perlu diperbarui, tidak menunjukkan proyeksi kebutuhan detail dan 2023 hingga 2027.	7.5			
		Catatan KASH untuk Aspek 1 (kosong)								Total 35	
1											
Nilai Sistem Merit: Kabupaten Karanganyar											
3	Pengembangan Karir	1	Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (menyangkut teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	5	3	2	Sudah tersedia SKJ dalam Perbup 40/2018 tentang SKJ Manajerial dan Sosokkultural untuk JPT, JA, dan Pengawas, namun belum menyusun SKJ Teknis.	10			
		2	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala	5	4	1	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT.	5			
		3	Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	5	4	0	Belum tersedia talent pool	0			
		4	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	2.5	4	0	Belum tersedia rencana suksesi	0			
		5	Ketersediaan informasi tentang kesempatan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	2.5	4	0	Belum menyusun analisis kesempatan kualifikasi dan kompetensi	0			
		6	Ketersediaan informasi tentang kesempatan kinerja;	2.5	4	4	Sudah tersedia analisis kesempatan kinerja untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala	10			
		7	Ketersediaan strategi dan program untuk mengantisipasi kesempatan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	2.5	3	1	Sudah tersedia strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka pendek (1 tahun) pada tahun 2022. Terlampir Keputusan Kepala BKPSDM 800/37 th 2021 tentang Penetapan Administrator dan Rencana Pengembangan PNS Tahun 2022.	2.5			
		Catatan KASH untuk Aspek 3 (kosong)								Total 42.5	
		4	Promosi dan Mutasi	1	Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permenn Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pola karir;	5	3	2	Sudah tersedia kebijakan internal (Permenn Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool	10	
				2	Ketersediaan kebijakan internal (Permenn Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool	2.5	4	2	Sudah ada kebijakan internal pengisian JPT secara terbuka	5	
		3	Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit	2.5	4	3	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional, namun pengisian Administrator dan Pengawas belum dilakukan dengan metode assessment	7.5			

Nilai Sistem Merit: Kabupaten Karanganyar									
Catatan KASHI untuk Aspek 4 : (kosong)									Total 22.5
5	Manajemen Kinerja	1	Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	kelela OPD, Pejabat Administrator, dan Pegawai sudah membuat perjanjian kerja setiap awal tahun berdasarkan renstra	5	4	4	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	20
		2	Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	semua pegawai setiap awal tahun sudah menyusun SKP dan setiap bulan capaian kinerja sudah dapat diukur	5	4	3	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai, namun belum menerapkan penilaian perilaku kerja menggunakan metode 360 kepada seluruh pegawai	15
		3	Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memfasilitasi tercapainya kontrak kinerja;	dalam penyusunan SKP untuk pembuatan matrik peran dan hasil berdasarkan dialog kinerja	2.5	4	4	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala sebulan sekali dalam aplikasi Aku Melayani yang disertai dialog kinerja	10
		4	Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	tidak ada permasalahan terkait kinerja	5	3	2	Sudah menganalisis permasalahan kinerja secara terstruktur. Saat ini sudah diidentifikasi penyebab dan rencana tindaklanjutnya terhadap beberapa pegawai yang nilai kerjanya di bawah "Baik". Akan tetapi, penyusunan strategi untuk mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi. Misal dengan menyusun rencana bangkom terhadap pegawai-pegawai terkait.	10
		5	Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Hasil penilaian kinerja sudah menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam penetapan talent pool	2.5	4	2	Sudah menjadikan penilaian kinerja sebagai dasar/perimbangan dalam pemberian dan pengembangan karier pegawai	5
Catatan KASHI untuk Aspek 5 (kosong)									Total 60
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1	Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2023 berdasarkan dengan aspek Disiplin Kehadiran dan Prestasi Kerja	2.5	4	4	Tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor yang utama disamping disiplin kerja	10

Nilai Sistem Merit: Kabupaten Karanganyar									
	2	Ketersediaan kebijakan internal (Permenn/Perbup/Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	tunjangan kinerja diberikan berdasarkan pencapaian prestasi kerja	2.5	3	1	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai dan sudah ditetapkan dalam peraturan internal, namun baru dilaksanakan di salah satu dinas/OPD. Perbup/Keptup mengenai penghargaan kepada pegawai dalam lingkup seluruh instansi masih belum ditetapkan dan belum terlaksana	2.5	
	3	Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	untuk penerapan penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik sampai saat ini	2.5	4	4	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku, membentuk tim penegakan dan menegakkan peraturan tersebut secara konsisten	10	
	4	Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian di internal instansi maupun dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKHI)	2.5	4	3	Sudah tersedia database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) internal, namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKHI)	7.5	
Catatan KASHI untuk Aspek 6 : (kosong)									Total 30
7	Perlindungan dan Pelayanan	1	Kebijakan perlindungan untuk pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	ada	2	3	4	Sudah menetapkan kebijakan perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai dan telah dilaksanakan secara reguler/terjadwal. Terlampir Perbup 60/2022 tentang Perlindungan dan Pelayanan. Secara umum bentuk perlindungan yang diberikan berupa Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Di luar itu juga terdapat pembekalan kepada pegawai yang akan memasuki purna tugas	8

Nilai Sistem Merit: Kabupaten Karanganyar									
		2	Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi,	Sudah menggunakan sistem online	2	4	3	Sudah menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai. Dalam pengisian cuti, pensiun, dsb. menggunakan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan digital	6
Catatan KASHI untuk Aspek 7 (kosong)									Total 14
8	Sistem Informasi	1	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai,	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyipkan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	2	4	3	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang diberikan secara berkala. Akan tetapi, saat ini aplikasi SIBIPSD belum bisa diakses secara mandiri oleh setiap pegawai,	6
		2	Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online,	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja) Aplikasi ekerja (Aku Melayani) dapat memantapkan estimasi TPP yang diperoleh	1	4	3	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja) Aplikasi ekerja (Aku Melayani) dapat memantapkan estimasi TPP yang diperoleh	3
		3	Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian,	Pelayanan administrasi kepegawaian seluruhnya dilakukan menggunakan e-office dan terhubung dengan sistem dashboard pimpinan (menggunakan SRKAI/ID)	1	4	4	Sudah sebagian pelayanan administrasi menggunakan e-office. Saat ini sudah menggunakan SRKAI/ID yang sudah dimanfaatkan dari unit terkait (Kecamatan)	4
		4	Pembangunan dan penggunaan assesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi,	seleksi JPT	2	1	1	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assesment center untuk JPT	2
Catatan KASHI untuk Aspek 8 (kosong)									Total 15
Total Penilaian Mandiri : 370									
Total Akhir (Hasil Verifikasi) : 257									

Nilai SAKIP BKPSDM



Perjanjian Kinerja 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : PJ. BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PJ. BUPATI KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19721104 199203 1 002

Karanganyar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR



NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770915 199602 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.

Jabatan : PTL. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR



NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770915 199602 2 001

Karanganyar, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,

PTL. SEKRETARIS



DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19690711 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%

No

Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp. 44.052.300

APBD

2

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Rp. 5.000.000

APBD

3

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Rp. 5.004.700

APBD

4

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Rp. 5.000.000

APBD

5

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Rp. 5.000.000

APBD

6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 15.000.000

APBD

7

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 171.875.850

APBD

8

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp. 5.882.231.081

APBD

9

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Rp. 15.000.000

APBD

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 5.999.000

APBD

11

Penyediaan Bahan logistik kantor

Rp. 26.000.000

APBD

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp. 25.963.100

APBD

13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 1.380.000

APBD

14

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp. 194.068.000

APBD

15

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Rp. 25.000.000

APBD

16

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp. 6.800.000

APBD

17

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 130.000.000

APBD

18

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 121.445.000

APBD

19

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp. 132.655.000

APBD

20

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp. 27.010.000

APBD

21

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp. 30.000.000

APBD

Jumlah

Rp. 6.874.314.031

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR



NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770915 199602 2 001

Karanganyar, 3 Februari 2025

Pihak Pertama,

PTL. SEKRETARIS



DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19690711 199603 2 002

BKPSDM | KABUPATEN KARANGANYAR

40

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOKO SUMARSONO, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

DJOKO SUMARSONO, S.E
Pembina
NIP. 19740111 199603 2 002

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM KEPEGAWAIAN			
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan
2.	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	100 %
3.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	100 %
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assessment center	4 Dokumen
	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	2 Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp. 200.000.000	APBD
2.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp. 15.000.000	APBD
3.	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 30.000.000	APBD
4.	Pengelolaan Naik Pangkat ASN	Rp. 40.000.000	APBD
5.	Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 274.812.000	APBD
6.	Pengelolaan Assessment Center	Rp. 210.000.000	APBD
7.	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp. 30.000.000	APBD
Jumlah		Rp. 799.812.000	

Karanganyar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

DJOKO SUMARSONO, S.E
Pembina
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN

DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19690711 199603 2 002

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen
2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp. 88.311.700	APBD
2.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 57.287.000	APBD
3.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 144.999.250	APBD
4.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp. 12.573.050	APBD
5.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp. 11.439.950	APBD
6.	Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 62.749.050	APBD
7.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp. 71.150.000	APBD
Jumlah		Rp. 448.500.000	

Karanganyar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN

DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19690711 199603 2 002

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISNIARI DEWI M. S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SDM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA



ISNIARI DEWI M. S.STP.
Pembina
NIP. 19770124 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan
2.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	100 %
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %
4.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 125.438.000	APBD
2.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 10.000.000	APBD
3.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 69.190.000	APBD
4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 12.000.000	APBD
5.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bag Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 469.936.750	APBD
6.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 1.361.981.600	APBD
Jumlah		: Rp 2.048.548.350	

Karanganyar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR



NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SDM



ISNIARI DEWI M. S.STP.
Pembina
NIP. 19770124 199703 2 004

Perjanjian Kinerja Penetapan 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : PJ. BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19770915 199602 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas, profesionalitas dan kuantitas ASN berbasis sistem merit 2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Sistem Merit Nilai SAKIP BKPSDM	255 76

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.511.811.680	APBD
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.545.000.000	APBD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 969.780.300	APBD
		Rp. 10.026.571.980	

Karanganyar, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721104 199203 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam Rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670114 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen
	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan kintisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan kintisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kintisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	4 laporan
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		

BKPSDM | KABUPATEN KARANGANYAR

43

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

	SKPD	
	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
		5 unit
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
		12 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
		12 laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
		4 laporan
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertzinannya
		17 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
		30 unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.875.000	APBD
2 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp. 5.000.000	APBD
3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Rp. 5.004.700	APBD
4 Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Rp. 5.000.000	APBD
5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Rp. 5.000.000	APBD
6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
7 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 5.000.000	APBD
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.682.630.680	APBD
9 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp. 15.000.000	APBD
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.999.000	APBD
11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 28.000.000	APBD
12 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 19.999.800	APBD
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1.380.000	APBD
14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 120.387.500	APBD
15 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 25.000.000	APBD
17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 100.000.000	APBD

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.600.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 120.000.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 115.385.000	APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 202.850.000	APBD
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.700.000	APBD
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 7.511.811.880	APBD

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670114 199503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DJOKO SUMARSONO, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR ANI FARIDA, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

NUR ANI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

DJOKO SUMARSONO, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19740111 199603 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengembangan Kompetensi ASN		
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	4 dokumen
2	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	3 dokumen
	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Naik ASN (jabatan fungsional) yang mendapatkan layanan pengembangan karir	600 orang
4	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		
	Pengelolaan Naik Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 dokumen
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dokumen
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Assessment Center	Rp. 260.000.000	APBD
2. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp. 15.000.000	APBD
3. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp. 300.000.000	APBD
4. Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp. 30.000.000	APBD
5. Pengelolaan Naik Pangkat ASN	Rp. 40.000.000	APBD
6. Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 30.000.000	APBD
7. Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 100.000.000	APBD
	Rp. 775.000.000	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN
MUTASI


DJOKO SUMARSONO, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19740111 199603 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN


DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19690711 199603 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dokumen
2	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8.800 orang
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	200 orang
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	200 orang
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	10 dokumen

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 60.000.000	APBD
2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 71.500.000	APBD
3. Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 55.000.000	APBD
4. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp. 104.000.000	APBD
5. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Rp. 10.000.000	APBD
6. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp. 60.500.000	APBD
7. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp. 88.000.000	APBD
	Rp. 449.000.000	

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN


DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19690711 199603 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAESELON III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SDM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNIARI DEWI M. S.STP.
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SDM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SDM

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

ISNIARI DEWI M. S.STP
Pembina
NIP. 19770124 199703 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SDM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	KegiatanPengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 dokumen
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	2 laporan
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen
2	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.600 orang
3	Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kopenensi Manajerial dan Fungsional		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	13 laporan
4	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	225 orang

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 80.000.000	APBD
2. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 50.000.000	APBD
3. Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp. 10.000.000	APBD
4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 717.780.300	APBD
5. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp. 252.000.000	APBD
6. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp. 181.000.0000 Rp. 1.290.760.300	APBD

Karanganyar, Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SDM

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770915 199602 2 001

ISNIARI DEWI M. S.STP
Pembina
NIP. 19770124 199703 2 004

PK Perubahan 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : PJ. BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR


TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	72
	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan kuantitas ASN berbasis sistem merit 2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Sistem merit Nilai SAKIP BKPSDM	250 76

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.344.946.680	APBD Perubahan APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp 2.230.637.000	Perubahan APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 969.760.300	Perubahan APBD
Jumlah		Rp 9.545.343.980	

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI KARANGANYAR


TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001


Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670114 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 249.029.700	APBD Perubahan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.122.630.680	APBD Perubahan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 407.300.847	APBD Perubahan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 104.000.000	APBD Perubahan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 253.704.500	APBD Perubahan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 208.280.953	APBD Perubahan
Jumlah		Rp 6.344.946.680	

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR


NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001


Drs. AGUNG TJAHJO NUGROHO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670114 199503 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19690711 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM KEPEGAWAIAN			
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen
2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 88.000.000	APBD Perubahan
2.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 361.000.000	APBD Perubahan
Jumlah		Rp 449.000.000	

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19690711 199603 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOKO SUMARSONO, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN MUTASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN
MUTASI

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

DJOKO SUMARSONO, S.E.
Pembina
NIP. 19740111 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
PROGRAM KEPEGAWAIAN			
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitas pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 Laporan
2.	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	100 %
3.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	100 %
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen Pengelolaan Assessment center	4 Dokumen
	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	2 Kegiatan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 1.018.772.000	APBD Perubahan
2.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp 15.000.000	APBD Perubahan
3.	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 136.865.000	APBD Perubahan
4.	Pengelolaan Assessment Center	Rp 260.000.000	APBD Perubahan
5.	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp 30.000.000	APBD Perubahan

Jumlah : Rp 1.460.637.000

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGANGKATAN DAN
MUTASI

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

DJOKO SUMARSONO, S.E.
Pembina
NIP. 19740111 199603 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISNIARI DEWI M. S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SDM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

ISNIARI DEWI M. S.STP.
Pembina
NIP. 19770124 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
PROGRAM KEPEGAWAIAN			
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 Dokumen
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 Dokumen
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 Laporan
2.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN	100 %
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	225 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %
4.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 80.000.000	APBD Perubahan
2.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp. 10.000.000	APBD Perubahan
3.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 50.000.000	APBD Perubahan
4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp. 181.000.000	APBD Perubahan
5.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 717.760.300	APBD Perubahan
6.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 252.000.000	APBD Perubahan

Jumlah : Rp 1.290.760.300

Karanganyar, 4 November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

NUR AINI FARIDA S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770915 199602 2 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SDM

ISNIARI DEWI M. S.STP.
Pembina
NIP. 19770124 199703 2 004